

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Geografi dan Demografi**

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111,0° hingga 114,4° Bujur Timur dan 7,12° hingga 8,48° Lintang Selatan. Sedangkan luas Provinsi Jawa Timur yang mencapai 47.995 km<sup>2</sup>. Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Jawa. Dimana luas wilayah Jawa Timur daratan hampir mencakup 90 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur, sedangkan luas Pulau Madura hanya sekitar 10 persen. Batas-batas wilayah Jawa Timur :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Pulau Kalimantan;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Pulau Bali;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan perairan terbuka yaitu Samudera Hindia;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.



**Gambar 4.1**  
Peta Provinsi Jawa Timur

Gambaran demografi wilayah Jawa Timur terlihat dari jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan tiap tahun. Pada tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 37,8 juta jiwa, meningkat hingga mencapai 38,6 juta jiwa pada tahun 2014 atau tumbuh 2,8 persen. Rata-rata pertumbuhan penduduk selama empat tahun terakhir 0,7 persen, cenderung semakin melambat tiap tahun dari 0,73 persen pada tahun 2011 menjadi 0,64 persen pada tahun 2014. Dilihat dari jenis kelaminnya, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki atau mempunyai sex ratio 97 persen atau setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki.

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kependudukan Provinsi Jawa Timur**

Uraian	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk (000 jiwa)	38.107	38.363	38.610	38.847
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,70	0,67	0,64	0,61
Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	794	800	805	810
Sex Ratio (L/P) (%)	97,46	97,43	97,40	97,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

## **B. Gambaran Umum Variabel Penelitian**

### **1. Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Rasio belanja modal terhadap pengembangan infrastruktur dari tahun ke tahun di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan namun tidak signifikan. Pada tahun 2013 rasio belanja modal Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.1.175.751,04 miliar rupiah meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp.1.057.365,18 miliar rupiah. Belanja modal yang terbesar pada tahun 2013 yaitu belanja pada peralatan mesin yang sebesar Rp.490.945,71 miliar rupiah.

**Tabel 4.2**  
**Komposisi Realisasi Belanja Modal Provinsi Jawa Timur**

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Belanja Modal</b>	877.876,93	1.045.351,91	1.057.365,18	1.175.751,04
Belanja Tanah	8.342,42	30.882,58	30.822,58	17.676,14
Belanja Peralatan Mesin	250.838,09	330.884,38	330.896,38	490.945,71
Belanja Gedung dan Bangunan	426.308,51	278.916,87	278.916,87	283.301,25
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	183.788,25	368.017,87	368.017,87	364.333,15
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.583,14	3.245,27	3.245,27	4.786,11
Belanja Aset Lainnya	1.016,52	33.474,94	33.474,94	14.708,68

Sumber : Jawa Timur dalam Angka, diolah

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. PAD seluruhnya digali dan berasal dari daerah sendiri. Oleh karena itu daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD ini sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, berarti daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal

Pada Tabel 4.3 Total realisasi Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2012 sampai 2014 perkembangan PAD terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 total realisasi PAD pada Provinsi Jawa Timur mencapai Rp.14.462.752,14 miliar rupiah. Penyumbang terbesar terhadap pos PAD adalah pajak daerah sebesar Rp.11.517.64,94 miliar rupiah meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp.9.404.933,62 miliar rupiah. Proporsi terbesar dalam PAD yang kedua pada tahun 2014 adalah

Lain-lain pendapatan asli yang sah sebesar Rp.2.453.509,90 miliar rupiah. Kemudian proporsi PAD selanjutnya adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp.342.920,27 miliar rupiah. Dan menyumbang terakhir PAD yang paling kecil adalah Retribusi Daerah yang sebesar Rp.342.920,27 miliar rupiah.

**Tabel 4.3**  
**Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur**  
**(juta rupiah)**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	9.733.647,78	11.579.340,72	14.462.753,14
Pajak Daerah	7.816.590,83	9.404.933,62	11.517.684,93
Retribusi Daerah	118.823,63	106.213,77	148.638,04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	352.889,91	332.020,39	342.920,27
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.445.333,40	1.736.172,93	2.453.509,90

Sumber : BPS, Jawa Timur dalam Angka

### 3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa dari tahun 2010 sampai 2014 dana alokasi umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 total realisasi DAU sebesar Rp.1.212.934,76 miliar rupiah meningkat sebesar Rp.1.866.548,19 miliar rupiah pada tahun 2014.

**Tabel 4.4**  
**Data Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Timur**  
**(dalam jutaan)**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>
2014	1.866.548,19
2013	1.496.594,26
2012	1.491.561,13
2011	1.347.501,69
2010	1.212.934,76

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

#### **4. Dana Bagi Hasil**

Selain dari PAD sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah tetapi dikelola oleh pemerintah pusat adalah beberapa komponen pajak dan beberapa sumber daya alam, yang sebagian pendapatannya dikembalikan ke daerah dalam bentuk bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam

Dari Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dana tranfer dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil pada Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuatif. Pendapatan yang diperoleh dari DBH yang paling besar pada tahun 2012 sebesar Rp.1.523.964.906 miliar rupiah. Pada tahun 2013 pendapatan atas DBH mengalami penurunan yang sebesar Rp.1.374.728.955 miliar rupiah. Dan di akhir tahun 2014 pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp.1.516.912.609 miliar rupiah akan tetapi pendapatan berupa transfer dari pemerintah pusat masih di bawah tahun 2012. Pendapatan atas DBH yang menyumbang terbesar adalah DBH atas pajak sebesar Rp.1.123.170.491 miliar rupiah dan sisanya

transfer berupa DBH hasil bukan pajak/sumber daya alam yang sebesar Rp.393.742.118 miliar rupiah.

**Tabel 4.5**  
**Data Dana Bagi Hasil Provinsi Jawa Timur**

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Dana Bagi Hasil</b>	1.523.964.906	1.374.728.955	1.516.912.609
Bagi Hasil Pajak	1.507.072.635	1.134.478.292	1.123.170.491
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	16.892.271	240.250.663	393.742.118

Sumber : BPS statistik daerah, diolah

## **5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Dari Tabel 4.6 dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebelumnya mengalami surplus paling tinggi pada tahun 2010 sebesar Rp.1.930.999,36 miliar rupiah. Sementara dana SiLPA pada tahun 2014 sebesar Rp1.846.787,52 miliar rupiah meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp.1.153.509,28 miliar rupiah.

**Tabel 4.6**  
**Data Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Provinsi Jawa Timur**  
**(dalam jutaan)**

<b>Tahun</b>	<b>SiLPA</b>
2014	1.846.787,52
2013	1.153.509,28
2012	1.223.913,81
2011	1.479.696,20
2010	1.930.999,36

Sumber : djpk.kemenkeu.go.id